

SKRIPSI

DEVY CHANDRA NILASARI

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG TERJADI DI WILAYAH ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

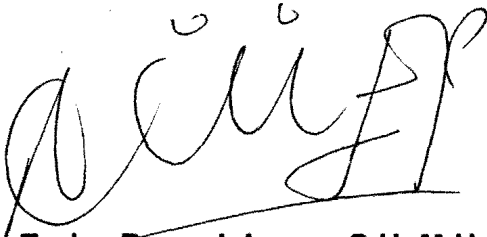
**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG TERJADI DI WILAYAH ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, belonging to Didik Endro Purwoleksono.

Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

NIP. 131 570 341

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, belonging to Devy Chandra Nilasari.

Devy Chandra Nilasari

NIM. 039614398

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Adanya pembagian laut di wilayah perairan Indonesia sangat diperlukan untuk menentukan batasan wilayah hukum yang berlaku untuk suatu wilayah tertentu sehingga nantinya terdapat adanya suatu kepastian mengenai hukum yang berlaku untuk wilayah tersebut . Selain itu perlu adanya dukungan berupa mental yang baik dari para aparat penegak hukum di laut pada umumnya dan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada khususnya sehingga hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya . Selain itu peran aparat penegak hukum juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menindak tegas para pelaku tindak pidana tersebut . Hal ini dimaksudkan untuk membuat jera para pelaku tindak pidana agar angka pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di wilayah tersebut dapat dikurangi .

- g. Pada tahap penyerahan perkara proses selanjutnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena di tahap ini peranan penyidik sudah tidak dibutuhkan lagi kecuali apabila berkas yang diserahkan dirasa belum lengkap maka akan dimintai keterangan dari penyidik awal sehingga proses peradilan terhadap tindak pidana yang terjadi dapat terlaksana dengan cepat , murah dan sederhana.
- h. Penyidikan yang dilakukan oleh perwira TNI-AL ini merupakan pelaksanaan dari pedoman yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan pada praktek pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang sulit dielakkan mengingat lokasi kejadian yang berada jauh dari daratan sehingga ada beberapa ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya .

2. Saran

Untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka harus terdapat kerja sama yang baik antara instansi-instansi yang memiliki kewenangan di laut di mana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan melalui operasi keamanan bersama di laut . Operasi keamanan Laut ini harus ditingkatkan dengan jalan penambahan kapal-kapal patroli sehingga ruang gerak para pelaku tindak pidana di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menjadi terbatas . Dengan demikian dapat dicapai hasil yang optimal agar kepentingan nasional dan kedaulatan negara Republik Indonesia dapat terjaga dengan baik .

KUHP maupun KUHPA . Karena tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan ketentuan khusus maka ketentuan tentang bentuk tindak pidana diatur secara limitatif . Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan penggunaan kewenangan yang berlebihan sehingga hak-hak para tersangka tindak pidana di ZEE Indonesia dapat terjamin .

- d. Adanya batasan wilayah hukum yang berlaku untuk laut di wilayah perairan laut Indonesia semata-mata digunakan hanya untuk mengetahui sejauh mana kedaulatan dan yurisdiksi negara Republik Indonesia berlaku di wilayah tersebut sehingga tidak timbul adanya praperadilan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh TNI-AL .
- e. Mengingat banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan di laut maka kedudukan Badan Koordinasi Keamanan Laut diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum di laut . Peranan Badan Koordinasi Keamanan Laut ini diharapkan mampu meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penegakan kedaulatan dan hukum di laut .
- f. Penyidikan yang dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ini harus sesuai dengan Surat Keputusan Kasal Nomor : Skep/3327/VII/1989 tanggal 20 Juli 1989 tentang Prosedur Pemeriksaan dan Penanganan Perkara Pidana di laut . Hal ini berkaitan dengan adanya kepastian hukum sehingga diharapkan dapat terwujud keadilan yang menjadi tujuan hukum.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan peluang diberlakukannya hukum acara pidana di luar KUHAP . Undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan ketentuan khusus dari hukum acara pidana di luar KUHAP , di mana dalam Undang-undang ini diatur tentang segala sesuatu yang ketentuannya tidak didapatkan di dalam KUHP maupun KUHAP.
- b. Dengan adanya UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia maka peranan penyidik yang semula dipegang oleh polisi menurut pasal 6 UU No. 8 tahun 1981 menjadi wewenang Tentara Nasional Indonesia . Hal ini terjadi karena UU No. 5 tahun 1983 merupakan ketentuan khusus yang memerlukan hukum acara yang khusus pula sehingga pejabat penyidiknya pun ikut berubah sesuai dengan yang dimuat dalam undang-undang tertentu di luar KUHAP tersebut . Digunakannya hukum acara pidana yang ada dalam UU No. 5 tahun 1983 karena dalam kenyataannya banyak ketentuan dari KUHAP yang tidak mendukung penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif .
- c. Undang-Undang No. 5 tahun 1983 hanya memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari KUHP dan KUHAP sedang selebihnya akan tunduk pada